



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2009
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA**

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kabupaten Jemberana wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jemberana, dengan tugas pokoknya masing-masing dipandang perlu penyesuaian Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2009 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

Pasal 1

Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah beserta masing-masing Satuan Perangkat Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana ini, Inspektorat Kabupaten Jembrana diberikan tugas :

- a. melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana setiap tahun.
- b. minimal 3 bulan sekali, melakukan pemantauan capaian kinerja masing-masing kegiatan pada SKPD.

Pasal 4

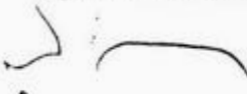
Naskah indikator Kinerja Utama di maksud Pasal 1, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

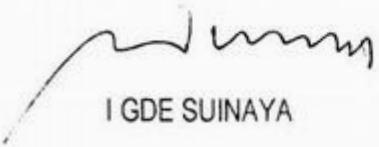
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Jembrana

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 17 Agustus 2009
BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 17 Agustus 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


I GDE SUINAYA

LAMPIRAAN : PERATURAN BUPATI JEMBRAN
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2009
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Jembrana
2. Tugas : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , mewujudkan keadilan dan keamanan yang didasari oleh iman dan budaya.
3. Fungsi :
 - 1) Meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*) melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat (Perekonomian).
 - 2) Peningkatan pelayanan umum (publik service) meliputi peningkatan infra struktur, sarana fisik seperti jalan, listrik, jaringan air bersih, peningkatan pelayanan administrasi dan komunikasi serta peningkatan sosial budaya.
 - 3) Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, gotong royong, serta harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku dan adat istiadat.
 - 4) Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

4. Indikator Kinerja

No.	Uraian	Alasan	Satuan Ukuran
a.	Pendidikan		
1.	• Jumlah kebijakan bidang pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan	bh
2.	• Prosentase APK Pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan perluasan akses	%
3.	• Prosentase APM Pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan perluasan akses	%
4.	• Rata-rata Nilai UAN Pendidikan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan mutu	nilai
5	• Banyaknya sekolah yang melaksanakan MPMB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan efisiensi	bh
	• Angka Buta huruf	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan penurunan Angka Buta huruf	or
6	• Prosentase lulusan terserap tenaga kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pendidikan terkait dengan relevansi	%
b.	Kesehatan		
1	• Jumlah kebijakan bidang kesehatan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan	buah
2	• Penduduk meninggal Akibat Wabah Penyakit	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan Pengurangan jumlah Penduduk meninggal Akibat Wabah Penyakit	Jenis
3	• Gizi buruk pada anak	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penurunan Gizi buruk pada anak	Or
4	• Angka kematian ibu (AKI)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penurunan kematian ibu	Or/1000
5	• Angka kematian bayi (AKB)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penurunan kematian bayi	Or/1000 KI Hidup
6	• Angka harapan hidup (AHH)	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan kenaikan angka harapan hidup	Tahun
7	• Balita Kekeurangan Gizi per Total Penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan penurunan Balita Kekeurangan Gizi per Total Penduduk	Or/1000 by
8	• Angka Kelahiran per Total Penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kesehatan terkait dengan Angka Kelahiran per Total Penduduk	Or/1000 penduduk
c.	Pekerjaan Umum		
1.	• Jumlah kebijakan bidang Pekerjaan Umum	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum	bh
2.	• Jumlah fasum yang dibangun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan fasum	bh
3.	• Jumlah fasum yang direhabilitasi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan rehabilitasi fasum	bh
4.	• Panjang jalan dibangun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan jalan	km
5	• Panjang jalan direhab	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan rehabilitasi jalan	km
6	• Panjang Irigasi di bangun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan irigasi	m
7	• Panjang Irigasi direhab	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan rehabilitasi irigasi	m

8	• Panjang Jembatan dibangun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan pembangunan jembatan	m
9	• Panjang Jembatan direhab	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pekerjaan Umum terkait dengan rehabilitasi irigasi jembatan	m
d	Perumahan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan perumahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan	bh
2	• Jumlah kawasan perumahan yang rencanakan dalam lima tahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan terkait dengan kawasan perumahan	bh
3	• Indeks Harga Bangunan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perumahan terkait dengan Indeks Harga Bangunan	Rp
e	Tata ruang		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan tata Ruang	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang	bh
2	• Jumlah dokumen tata ruang diterbitkan setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang terkait dengan penerbitan dokumen	bh
3	• Jumlah ijin lokasi yang disurvey	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tata Ruang terkait dengan survey penerbitan ijin dalam setahun	bh
f.	Perencanaan Pembangunan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Perencanaan Pembangunan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan	bh
2	• Jumlah dokumen perencanaan yang diterbitkan dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan terkait dengan penyusunan RPJPD, RPJMD, KUAPBD, PPAS, RKPD, dan dokumen perencanaan daerah lainnya.	bh
3	• Jumlah pelaporan kinerja SKPD yang diterbitkan tepat waktu dalam setahun	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perencanaan Pembangunan terkait laporan kinerja	bh
g.	Perhubungan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan perhubungan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan	bh
2	• Jumlah marka jalan dibuat	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perhubungan terkait dengan pembuatan marka jalan	bh
h.	Lingkungan Hidup		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Lingkungan Hidup	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup	bh
2	• Banyak sosialisasi tentang persampahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan persampahan	bh
3	• Jumlah taman kota ditata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan lingkungan hidup terkait dengan penataan taman kota	bh
i.	Pertanahan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan pertanahan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pertanahan	bh
2	• Jumlah aset tersertifikatkan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan pertanahan terkait dengan sertifikasi aset	bh
j.	Kependudukan dan Catatan Sipil		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil	bh
2	• Jumlah penduduk yang memiliki akta cacatan sipil	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil terkait dengan kepemilikan akta	or

3	• Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan kependudukan terkait dengan Laju Pertumbuhan Alamiah Penduduk	%
k.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	bh
l.	Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	bh
m.	Sosial		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Sosial	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Sosial	bh
n.	Tenaga Kerja		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Tenaga Kerja	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja	bh
2	• Tingkat Pengangguran	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Tenaga Kerja terkait dengan penurunan tingkat pengangguran	%
o.	Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	bh
2	• Jumlah koperasi sehat	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah terkait dengan kesehatan koperasi	bh
p.	Penanaman Modal		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Penanaman Modal	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal	bh
2	• Laju Pertumbuhan Ekonomi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi	%
3	• Jumlah struktur ekonomi yang berkembang Struktur Perekonomian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan pengembangan Struktur Perekonomian	bh
4	• Jumlah potensi investasi yang terekspos tingkat nasional	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan ekspos potensi investasi	bh
5	• Besarnya PDRB Per Kapita	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan PDRB Per Kapita investasi	milyar Rp
6	• Tingkat Investasi Pemerintah Daerah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Penanaman Modal terkait dengan Tingkat Investasi Pemerintah Daerah	%
q.	Kebudayaan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Kebudayaan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan	bh
2	• Jumlah aset budaya terdata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kebudayaan terkait dengan pendataan aset budaya	

r.	Pemuda dan Olahraga		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Pemuda dan Olahraga	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga	bh
2	• Jumlah pemuda putus sekolah yang terbina	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait pembinaan pemuda	or
3	• Jumlah kejuaraan yang dimenangkan minimal tingkat provinsi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemuda dan Olahraga terkait dengan prestasi olahraga	bh
s.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	bh
t.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian	bh
2	• Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan diklat substantif	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kepegawaian	or
3	• Jumlah SKPD yang memiliki Pegawai sesuai dengan formasi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kepegawaian terkait dengan formasi	bh
4	• Jumlah Aset daerah terdata dengan baik	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan penataan aset daerah	bh
5	• Rasio sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan standar pelayanan yang baik	Mengukur kinerja keefektifan organisasi dalam urusan perlengkapan	%
6	• Jumlah penegakan Perda setiap tahun	Mengukur kinerja organisasi dalam penegakan Perda	kali
7	• Jumlah dokumen hukum yang diproses	Mengukur kinerja organisasi dalam penyusunan dokumen hukum di daerah	bh
5	• Jumlah SKPD yang melaksanakan penataan rincian tugas pejabat dan staf	Mengukur kinerja organisasi dalam regulasi penataan organisasi dan tata laksanaan	bh
6	• Jumlah bansos yang dikaji	Mengukur kinerja organisasi dalam pengakajian bansos	kali
7	• Jumlah SKPD yang menyusun dokumen keuangan tepat waktu	Mengukur kinerja organisasi dalam penyusunan dokumen Keuangan	bh
8	• Jumlah SKPD yang melaksanakan laporan keuangan tepat waktu	Mengukur kinerja organisasi dalam pelaporan Keuangan	bh
9	• Jumlah Hamas yang diperingati	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan tata pemerintahan	kali
10	• Jumlah obrik yang diperiksa	Mengukur kinerja organisasi dalam kepengawasan	kali
11	• Jumlah SKPD melaporkan pelaksanaan Inpres Nomor 5	Mengukur kinerja organisasi dalam kepengawasan, terkait dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun	bh

	Tahun 2004	2004	
12	• Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	Mengukur kinerja organisasi terkait dengan tindak lanjut temuan hasil kepengawasan	bh
13	• Jumlah ijin yang diterbitkan	Mengukur kinerja organisasi dalam penerbitan ijin	bh
14	• Jumlah kejadian rawan sosial yang terdeteksi	Mengukur kinerja organisasi dalam pendeteksi rawan sosial	kali
15	• Jumlah PNS yang memiliki sertifikasi Penyidik PNS	Mengukur kinerja organisasi dalam meningkatkan kemampuan PPNS	or
16	• Jumlah bencana yang tertangani	Mengukur kinerja organisasi dalam menangani bencana	kali
u.	Ketahanan Pangan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Pangan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan	bh
2	• Indek pertanaman sawah	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait Indek pertanaman sawah	bh
3	• Tersedianya jaringan irigasi ditingkat usaha tani	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait jaringan irigasi ditingkat usaha tani	bh
4	• Tersedianya pupuk organik	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait pupuk organik	bh
5	• Tersedinya benih perkebunan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait Tersedinya benih perkebunan	kg
6	• Tersedianya HMT	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait HMT	bt
7	• Terlaksananya IB	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait pelaksanaan IB	paket
8	• Jumlah Tempat pelelangan ikan,	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait tempat pelelangan ikan	bh
9	• Jumlah Dermaga,	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pangan terkait Dermaga	bh
v.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa	bh
2	• Jumlah KK miskin	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pemberdayaa Masyarakat dan Desa terkait penurunan KK miskin	KK
w.	Statistik		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Statistik	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Statistik	bh
2	• Jumlah data yang tersedia	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Statistik terkait dengan Jumlah data yang tersedia	bh
x.	Kearsipan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Kearsipan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan	bh
2	• Jumlah jenis arsip ditata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kearsipan terkait dengan penataan arsip	bh
y.	Komunikasi dan Informatika		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Komunikasi dan Informasi	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi	bh
2	• Jumlah pemberitaan tentang kegiatan daerah di media massa	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Komunikasi dan Informasi terkait dengan sosialisasi kegiatan pemerintah ddaerah	
z.	Perpustakaan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Perpustakaan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Perpustakaan	bh

aa.	Pertanian		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Pertanian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pertanian	bh
bb.	Kehutanan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Kehutanan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kehutanan	bh
cc.	Energi dan Sumberdaya mineral		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Energi dan sumber Daya mineral	bh
dd.	Pariwisata		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Pariwisata	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Pariwisata	bh
ee.	Kelautan dan Perikanan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Kelautan dan Perikanan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan Kelautan dan perikanan	bh
ff.	Perdagangan		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Perdagangan	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan	bh
2	• Tingkat Rataan Daya Beli	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan perdagangan terkait dengan peningkatan Daya Beli	%
gg.	Industri		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Industri	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan industri	bh
hh.	Ketransmigrasian		
1	• Jumlah kebijakan dalam urusan Ketransmigrasian	Mengukur kinerja organisasi dalam urusan ketransmigrasian	bh

BUPATI JEMBRANA



I GEDE WINASA